

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN
JAMINAN PERSONAL GUARANTEE PADA BMT IBADI
KABUPATEN TEGAL**

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

ZAINUR ICHSAN

NIM : C. 100.090.059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, S.H.,M.H)

Pembimbing II

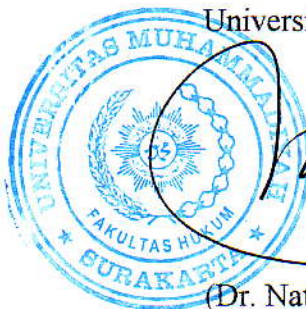


(Shallman Al-Farizy, S.H.,M.Kn)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN
JAMINAN PERSONAL GUARANTEE PADA BMT IBADI
KAB. TEGAL
ZAINUR ICHSAN
C10009059
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

[Zain Ichsan@ymail.com](mailto:Zain_Ichsan@yahoo.com)

ABSTRAK

Zainur Ichsan. C.100.090.059: Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Personal Guarantee Pada BMT Ibadi Kab. Tegal. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan *personal guarantee* pada BMT Ibadi Kabupaten Tegal. Metode Penelitian adalah metode penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Jenis Penelitian adalah deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan jenis pendekatan yaitu kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara baik dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR. (2) Akta *personal guarantee* dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Kredit Bank, Jaminan Personal Guarantee, BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

ABSTRACT

Zainur Ichsan. C.100.090.059: Judicial Review of the Bank Lending with the Guarantee of the Personal Guarantee of the Ibadi BMT of Tegal Regency. Faculty Of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. This research aims to find out the procedure of bank lending with the guarantee of personal guarantee at the BMT Ibadi of Tegal Regency. Research method is yuridis sosiologis or empiric. Research type is descriptive. Method of collecting data are interview and literature study. Method of analysis data which is used according to approach type, that is qualitative. The conclusion of this research are: (1) In order to credit lending can be implemented well and according to pure loan principles as contained in Decree of Board Directors of Bank Indonesia Number 27/162/KEP/DIR. (2) Deed of personal guarantee can be made with the underhand deed or with the authentic deed.

Keywords: Judicial Review, Bank Credit, Guarantee of Personal Guarantee, BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (*funding*) dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*).¹

Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya berdasarkan pada faktor *financial*, yang tercakup pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur. Namun demikian, dengan memperhatikan adanya *prudential banking principles*, maka faktor *financial* saja belum cukup untuk memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan *second wayout*, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini diluar kredit komersial telah mengarah pada faktor agunan sebagai *variable* dominan yang dapat memberikan keyakinan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Kredit dari sisi bank merupakan sumber

¹ Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 268.

pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan bank itu sendiri.² Secara garis besar, dikenal ada dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan: “*segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*”.

Jaminan secara umum berlaku bagi semua kreditur, sehingga kalau ada banyak kreditur ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak lagi mendapat bagian. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yang hak-hak tagihannya mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditur *privilege* (hak *preverent*).³

Jaminan kebendaan dapat berupa Hipotik, Fidusia, Gadai, *Cessie*. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan oleh debitur tertentu.⁴

Perjanjian jaminan perorangan atau *Personal Guarantee* adalah suatu perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang (kredit). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1821 KUHPerdara yang menyatakan “*Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.*” Oleh karena itu, pemberian *Personal Guarantee* harus menyebut perjanjian pokok

² Suharno, 2003, *Analisa Kredit*, Jakarta: Djambatan, hal 2.

³ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 207.

⁴ J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 17.

(perjanjian kredit) yang mana yang ditanggung oleh pemberi jaminan (peng-*Guarantee*) tersebut.⁵

Pembahasan dan Perumusan masalah yang hendak penulis bahas agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang, yaitu yang *pertama*, Bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan *personal guarantee*; *kedua*, Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi *personal guarantee*; *ketiga*, bagaimana hak dan kewajiban penjamin pada BMT Ibadi Kab. Tegal?

Tujuan penelitian: (a) Bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan *personal guarantee* pada bank perkreditan rakyat pada daerah Kabupaten Tegal. (b) Untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan yang diterapkan BMT Ibadi dalam pelaksanaan perkreditan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah: *pertama*, metode pendekatan, metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris).⁶ Karena yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.⁷ *Kedua*, metode pengumpulan data, studi yang pada awal tahap disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara: mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder

⁵ Try Widiyono, *Op.Cit*, hal 268.

⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 72-79.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal 6.

yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya kemudian akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Lokasi penelitian di BMT Ibadi Cabang Kabupaten Tegal.

Metode penelitian adalah metode penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Jenis penelitian adalah deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan jenis pendekatan, yaitu kualitatif. Komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur BMT Ibadi Kab. Tegal Dalam Pelaksanaan Perkreditan Dengan Jaminan *Personal Guarantee*

Setiap bank memiliki aturan intern yang berbeda-beda dalam prosedur pemberian kredit bagi nasabah atau calon nasabahnya. Persaingan dunia perbankan dalam menyalurkan kreditnya menunjukkan suatu suasana yang semakin ketat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara baik dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Untuk itu Bank Umum harus memiliki dan melaksanakan kebiasaan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995.

Persyaratan Untuk Menjadi Penjamin/*Personal Guarantee*

Kriteria risiko yang dapat diterima oleh BMT IBADI Cabang Kab. Tegal sebagai kreditur merupakan risiko yang juga termasuk dalam kriteria debitur, calon debitur atau penjamin sendiri. Sebagai pihak yang mengajukan permohonan kredit debitur atau nasabah wajib memberikan penjamin atau penanggung yang dipersyaratkan oleh BMT IBADI Cabang Kab. Tegal. Hal ini adalah wajar karena BMT IBADI Cabang Kab. Tegal sebagai kreditur berusaha agar kredit yang diberikannya tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan, minimal bank mempunyai sumber pelunasan lain disamping jaminan kebendaan jika terjadi wanprestasi.

BMT IBADI Cabang Kab. Tegal memiliki beberapa kriteria yang harus diperhatikan dari penjamin yaitu:

Pertama, legalitas penjamin

Bila penjamin atau penanggung adalah perseorangan (*personal guarantee*), maka pihak bank perlu mengadakan analisa diantaranya dari aspek hukum secara rinci, yaitu: ⁸ (a) nama, (b) cakap, (c) dewasa, (d) orang dibawah dibawah pengawasan atau pengampuan, (e) orang yang dinyatakan pailit, (f) kewarganegaraan, (g) domisili.

Kedua, kemampuan penjamin

Pihak bank harus menganalisa dan memastikan bahwa harta kekayaan

⁸ Suharno, Op.Cit, hal.15-18

penjamin atau penanggung mampu atau tidak untuk membayar utang debitur yang ditanggungnya.

Ketiga, pelepasan hak istimewa

Untuk mempercepat proses penyelesaian utang debitur, BMT Ibadi Cabang Kab. Tegal meminta kepada seorang penjamin atau penanggung untuk melepaskan hak istimewa yang diberikan kepadanya sesuai ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keempat, total nilai jaminan yang diberikan

BMT IBADI Cabang Kab. Tegal harus mengetahui berapa kali dan berapa besar nilai jaminan dimana penjamin atau penanggung sedang memberikan penanggungan utang. Semakin sering seorang penjamin atau penanggung maka akan semakin kecil rasio hartanya dengan utang-utang yang dijamin sehingga bila para kreditur akan melakukan eksekusi atas penanggungan utang tersebut kemungkinan harta penanggungan sudah tidak lagi memadai.

Kelima, kekuatan pembuktian penjamin

BMT Ibadi Cabang Kab. Tegal menetapkan bahwa *personal guarantee* dapat diterima bila dilakukan dalam bentuk akta notaris atau akta otentik.

Hak Penjamin

Berdasarkan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin adalah sebagai berikut ini:

Pertama, hak si penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan

dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka harta si penjamin yang kemudian akan di eksekusi hartanya;

Kedua, hak si penjamin untuk tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung. Dengan kata lain dalam hak ini ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam suatu perjanjian secara jamin menjamin.

Ketiga, hak si penjamin untuk mengajukan tangkisan yang tertuang dalam Pasal 1849 dan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak ini lahir dari perjanjian penjaminan. Dalam hak ini penjamin memiliki hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur kepada kreditur terkecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadinya debitur (tertuang dalam Pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Keempat, hak si penjamin untuk membagi utang. Dalam hak ini dimaksudkan bahwa apabila dalam suatu perjanjian penjaminan ada beberapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur dan utang yang sama maka setiap penjamin terikat untuk keseluruhan utang.

Kelima, hak si penjamin untuk diberhentikan dari penjamin. Dalam pengertian bahwa seorang penjamin berhak meminta kepada kreditur untuk dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika terdapat alasan untuk itu.

Kewajiban Penjamin

Berdasarkan kedudukan *personal guarantee* dapat diketahui sejauh mana kewajibannya dalam bertanggung jawab sebagai *personal guarantee* dalam suatu kredit, yaitu:

Pertama, personal guarantee berkewajiban ikut bertanggung jawab atas jaminan pembayaran hutang-hutang debitur, karena *Personal Guarantee* ini secara tidak bersyarat telah menyetujui kewajibannya untuk ikut membayar hutang debitur ataupun ganti rugi kepada kreditur bila debitur tersebut wanprestasi. Bila suatu waktu *guarantor* tersebut tidak mampu lagi menjamin pembayaran tersebut, maka hilanglah tanggung jawabnya sebagai penjamin.

Kedua, personal guarantee dalam hal perkara ini berkewajiban harus menunjuk pengganti dirinya bila ia telah tidak mampu lagi menjamin pembayaran hutang-hutang debitur.

Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1829 KUH Perdata, yang berbunyi: “*Apabila si penjamin yang telah diterima oleh yang berpiutang secara sukarela atau dasar Putusan Hakim, kemudian menjadi tidak mampu, maka harus ditunjuk seorang penanggung baru*”.

Ketiga, personal guarantee berkewajiban ikut bertanggung jawab untuk dapat sebagai “cadangan” dalam hal harta debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang.

Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Perkreditan

Pertama, bentuk wanprestasi dari debitur, adalah:⁹

- a. Debitur tidak melaksanakan angsuran yang telah jatuh tempo atau jumlah lain yang terhutang dan yang telah disepakati serta ditentukan berdasarkan perjanjian ini, hal ini sesuai dengan pendapat R. Subekti yaitu wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Debitur tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat berkenaan dengan perjanjian ini, hal ini sesuai dengan pendapat R. Subekti yaitu wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Kedua, akibat hukum yang terjadi dengan adanya wanprestasi:¹⁰

- a. Untuk wanprestasi pihak debitur tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo atau jumlah lain yang terhutang dan telah disepakati serta ditentukan berdasarkan perjanjian ini akibat hukumnya adalah debitur wajib membayar denda keterlambatan 1,5% (satu setengah persen) per hari dari jumlah angsuran yang belum dibayarkan.
- b. Untuk wanprestasi pihak debitur tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian

⁹ Wawan Hermansyah, Divisi Account Officer BMT IBADI Cabang Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, Tegal, 16 Maret 2015, pukul 13:00 WIB.

¹⁰ Wawan Hermansyah, Divisi Account Officer BMT IBADI Cabang Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, Tegal, 16 Maret 2015, pukul 13:00 WIB..

jaminan yang dibuat berkenaan dengan perjanjian ini akibat hukumnya adalah BMT Ibadi Cabang Kab. Tegal, akan menyita barang yang menjadi jaminan untuk sementara waktu. Batas waktu yang diberikan oleh pihak BMT Ibadi kepada debitur untuk memenuhi persyaratan tersebut adalah 10 (sepuluh) hari. Jika dalam 10 (sepuluh) hari debitur tidak memenuhi persyaratan tersebut maka barang yang menjadi jaminan akan menjadi milik BMT Ibadi.

Ketiga, wanprestasi dari penerima kredit, dalam perjanjian jaminan:¹¹

Debitur tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian-perjanjian Jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini, hal ini sesuai dengan pendapat R. Subekti yaitu wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Keempat, akibat hukum yang terjadi dengan adanya wanprestasi:¹²

Melakukan segala tindakan lain apapun juga yang dipandang baik, perlu dan berguna untuk tercapainya kuasa di atas, dengan segala risiko serta biaya yang timbul akibat dalam rangka dari eksekusi Perjanjian Jaminan ataupun dalam rangka pelaksanaan kuasa, termasuk kemungkinan adanya tuntutan ganti kerugian oleh pihak ketiga serta biaya-biaya penarikan barang jaminan dan

¹¹ Wawan Hermansyah, Divisi Account Officer BMT IBADI Cabang Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, Tegal, 16 Maret 2015, pukul 13:00 WIB.

¹² Wawan Hermansyah, Divisi Account Officer BMT IBADI Cabang Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, Tegal, 16 Maret 2015, pukul 13:00 WIB.

biaya-biaya lainnya, sepenuhnya menjadi tanggungan pihak debitur, hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf c.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, pemberian kredit dapat dilaksanakan secara baik dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis dan Bank Umum harus memiliki dan melaksanakan kebiasaan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995.

Kedua, prosedur antara tahap satu dengan tahap lainnya adalah saling berkaitan. Bila salah satu tahap tidak terlampaui, maka tahap yang lain tidak dapat dilanjutkan. Dengan demikian, bila tahap perjanjian tidak ada, maka penjaminan dan pengikatan jaminan serta pencairan kredit dan seterusnya tidak akan pernah ada.

Ketiga, adanya keharusan bagi debitur untuk menyerahkan jaminan berupa *personal guarantee* baik berupa perorangan maupun badan hukum disyaratkan oleh BMT IBADI Cabang Kab. Tegal pada saat memberitahukan persetujuan kredit tertentu. Surat Penawaran Putusan Kredit adalah sebagai tanda bahwa BMT IBADI Cabang Kab. Tegal telah menyetujui fasilitas kredit yang dimohon debitur, yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh debitur.

Keempat, akta *personal guarantee* dapat dibuat dengan akta dibawah tangan

atau dengan akta otentik.

Kelima, pihak bank memiliki pertimbangan lain dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pertimbangan tersebut telah dikesampingkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3/1963 tanggal 5 September 1963, artinya pada saat ini seorang perempuan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Keenam, pihak bank juga menetapkan bahwa orang dianggap telah dewasa jika sudah berumur 18 tahun keatas atau sebelum berumur 18 tahun tetapi telah melangsungkan pernikahan saja yang dapat mengajukan kredit.

Ketujuh, akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yaitu debitur tidak melaksanakan angsuran yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian kredit ini maka jaminan yang dibuat berkenaan dengan perjanjian ini akibat hukumnya adalah BMT Ibadi Cabang Kab. Tegal, akan menyita barang yang menjadi jaminan untuk sementara waktu.

Kedelapan, upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh BMT Ibadi Cabang Kab. Tegal bila debitur melakukan wanprestasi, adalah: (1) Peringatan secara tertulis; (2) Peringatan secara lisan melalui telepon kepada debitur; (3) Surat Peringatan 1 atau Somasi 1; (4) Surat Peringatan 2 atau Somasi 2; (5) Surat Panggilan; (6) Penarikan objek pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdata dan Pasal 29 ayat (1).

Saran

Pertama, pihak kreditur dalam melaksanakan perjanjian kredit pada BMT Ibadi Cabang Kab. Tegal harus didasarkan pada perjanjian baku yaitu perjanjian yang isinya dibakukan (ditentukan standarnya, sehingga memiliki arti yang tetap, yang menjadi pegangan umum), dan dituangkan dalam bentuk formulir yang dibuat kreditur sehingga debitur tinggal menyetujui kontrak tersebut. Maka sebaiknya debitur terlebih dahulu membaca atau mempelajari isi perjanjian tersebut agar debitur mengerti dengan isi yang diperjanjikan dan agar pihak debitur tidak merasa tertipu.

Kedua, pihak debitur sebaiknya selalu melakukan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, karena pihak debitur telah terikat dalam perjanjian dengan kreditur. Untuk itu penuhilah selalu kewajiban pembayaran angsuran setiap bulan agar tidak terjadi wanprestasi. Apabila telah terjadi wanprestasi hendaklah debitur bersifat kooperatif.

Ketiga, pihak kreditur dalam melaksanakan upaya hukum yang dilakukan oleh BMT Ibadi Cabang Kab. Tegal bila penerima kredit melakukan wanprestasi sebaiknya penarikan barang yang menjadi jaminan dari kesepakatan kredit untuk selanjutnya barang jaminan tersebut dilelang, dan untuk kalangan terbatas dimana peserta lelangnya hanya untuk kalangan pegawai BMT Ibadi dan BMT Ibadi melakukan pelelangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelelangan Lelang.

Keempat, pihak kreditur harus memberikan kepastian didalam pelayanan

perkreditan dan pihak kreditur hendaknya juga harus menjelaskan berbagai saran agar pihak debitur tidak mengalami kebingungan dalam hal upaya mempertanggung jawabkan kewajibannya supaya tidak terjadi wanprestasi.

Kelima, agar tercipta hubungan yang harmonis antara pihak-pihak BMT Ibadi Cabang Kab. Tegal dalam hal ini pegawai/kreditur dengan debitur, sebaiknya pihak debitur harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan semestinya demi meningkatkan kerja sama yang baik dan produktifitas kerja yang meningkat.

Keenam, guna mempertinggi dedikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BMT Ibadi Cabang Kab. Tegal sebagai jasa simpan pinjam dan perkreditan, sebaiknya pihak kreditur perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas baik sarana maupun personil yang ada (khususnya dalam pelayanan perkreditan).

Ketujuh, sebaiknya pihak kreditur mensyaratkan seorang *personal guarantee* dengan melengkapi data pernyataan perjanjian jaminan dalam bentuk akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Naja, Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Satrio, J., 2007, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suharno, 2003, *Analisa Kredit*, Jakarta: Djambatan.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Widiyono, Try, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK 01/2000 tentang Petunjuk Pelelangan Lelang

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 24/1/UKU tentang Kredit

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 tanggal 5 September 1963 Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan